



PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012
BUPATI NATUNA,

- Menimbang** : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, perlu menetapkan Peraturan Bupati Natuna tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);

5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4389);
10. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
13. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

14. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 5049);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 terdiri atas :

1. Pendapatan			
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	25.191.700.000,00	
b. Dana Perimbangan	Rp.	1.150.137.683.147,00	
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp.	<u>64.900.771.553,00</u>	
Jumlah Pendapatan			Rp. 1.240.230.154.700,00
2. Belanja			
a. Belanja Tidak Langsung			
1) Belanja Pegawai	Rp.	249.193.289.060,00	
2) Belanja Bunga	Rp.	0,00	
3) Belanja Subsidi	Rp.	29.740.916.000,00	
4) Belanja Hibah	Rp.	147.455.600.000,00	
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	91.802.400.000,00	
6) Belanja Bagi Hasil	Rp.	0,00	
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	37.268.800.000,00	
8) Belanja Tidak Terduga	Rp.	<u>1.000.000.000,00</u>	
			Rp. 556.461.005.060,00
b. Belanja Langsung			
1) Belanja Pegawai	Rp.	112.188.167.000,00	
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	408.449.554.580,00	
3) Belanja Modal	Rp.	<u>422.901.273.360,00</u>	
			Rp. 943.538.994.940,00
Jumlah Belanja			<u>Rp. 1.500.000.000.000,00</u>
Surplus / (Defisit)			Rp. (259.769.845.300,00)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan	Rp.	259.769.845.300,00	
b. Pengeluaran	Rp.	0,00	
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp.	259.769.845.300,00	
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan	Rp.		0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran RAPBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

P a s a l 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Natuna.

P a s a l 5

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

P a s a l 6

Peraturan Bupati Natuna ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 16 Pebruari 2012

BUPATI NATUNA,

ttd

ILYAS SABL I

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 16 Pebruari 2012

PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SYAMSURIZON, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19610309 199203 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2012 NOMOR 3

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
RINGKASAN APBD
Tahun Anggaran 2012

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
4.	PENDAPATAN	
4. 1.	Pendapatan Asli Daerah	21,391,700,000.00
4. 1. 1.	Hasil Pajak Daerah	3,139,400,000.00
4. 1. 1. 01.	Pajak Hotel	55,000,000.00
4. 1. 1. 01. 06.	Hotel bintang satu	55,000,000.00
4. 1. 1. 02.	Pajak Restoran	60,500,000.00
4. 1. 1. 02. 01.	Restoran	60,500,000.00
4. 1. 1. 03.	Pajak Hiburan	3,300,000.00
4. 1. 1. 03. 02.	Pagelaran kesenian/musik/tari/busana	3,300,000.00
4. 1. 1. 04.	Pajak Reklame	121,000,000.00
4. 1. 1. 04. 01.	Reklame papan/bill board/vidiotron/megatron	121,000,000.00
4. 1. 1. 05.	Pajak Penerangan Jalan	2,310,000,000.00
4. 1. 1. 05. 01.	Pajak penerangan jalan PLN	660,000,000.00
4. 1. 1. 05. 02.	Pajak penerangan jalan non PLN	1,650,000,000.00
4. 1. 1. 06.	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	88,000,000.00
4. 1. 1. 06. 06.	Batu kerikil	88,000,000.00
4. 1. 1. 07.	Pajak Parkir	55,000,000.00
4. 1. 1. 07. 01.	Pajak parkir	55,000,000.00
4. 1. 1. 08.	Pajak Air Tanah	1,100,000.00
4. 1. 1. 08. 01.	Pajak air tanah	1,100,000.00
4. 1. 1. 09.	Pajak Sarang Burung Walet	11,000,000.00
4. 1. 1. 09. 01.	Pajak sarang burung walet	11,000,000.00
4. 1. 1. 12.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	434,500,000.00
4. 1. 1. 12. 01.	Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	434,500,000.00
4. 1. 2.	Hasil Retribusi Daerah	542,300,000.00
4. 1. 2. 01.	Retribusi Jasa Umum	95,700,000.00
4. 1. 2. 01. 02.	Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan	22,000,000.00
4. 1. 2. 01. 05.	Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum	11,000,000.00
4. 1. 2. 01. 07.	Retribusi pengujian kendaraan bermotor	2,200,000.00
4. 1. 2. 01. 08.	Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran	22,000,000.00
4. 1. 2. 01. 13.	Retribusi pengendalian menara telekomunikasi	27,500,000.00
4. 1. 2. 01. 14.	Retribusi pelayanan tera/tera ulang	11,000,000.00
4. 1. 2. 02.	Retribusi Jasa Usaha	159,500,000.00
4. 1. 2. 02. 05.	Retribusi tempat khusus parkir	11,000,000.00
4. 1. 2. 02. 11.	Retribusi penyeberangan di air	66,000,000.00
4. 1. 2. 02. 16.	Retribusi angkutan bus	82,500,000.00
4. 1. 2. 03.	Retribusi Perizinan Tertentu	287,100,000.00
4. 1. 2. 03. 01.	Retribusi izin mendirikan bangunan	66,000,000.00
4. 1. 2. 03. 05.	Retribusi izin usaha perikanan	66,000,000.00
4. 1. 2. 03. 09.	Retribusi izin tempat usaha	132,000,000.00
4. 1. 2. 03. 11.	Retribusi izin usaha pariwisata	11,000,000.00
4. 1. 2. 03. 12.	Retribusi izin usaha kesehatan	2,200,000.00
4. 1. 2. 03. 13.	Retribusi penggantian biaya SIUP dan TDP	7,700,000.00
4. 1. 2. 03. 14.	Retribusi pengambilan hasil hutan ikutan	2,200,000.00
4. 1. 3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,060,000,000.00
4. 1. 3. 01.	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	110,000,000.00
4. 1. 3. 01. 01.	Perusahaan daerah	110,000,000.00
4. 1. 3. 03.	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	4,950,000,000.00
4. 1. 3. 03. 02.	Bank	4,950,000,000.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
4. 1. 4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	12,650,000,000.00
4. 1. 4. 02.	Penerimaan Jasa Giro	3,850,000,000.00
4. 1. 4. 02. 01.	Jasa giro kas daerah	3,300,000,000.00
4. 1. 4. 02. 02.	Jasa giro pemegang kas	550,000,000.00
4. 1. 4. 03.	Pendapatan Bunga Deposito	8,800,000,000.00
4. 1. 4. 03. 01.	Rekening deposito pada bank ...	8,800,000,000.00
4. 2.	Dana Perimbangan	1,150,137,683,147.00
4. 2. 1.	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	1,029,230,371,147.00
4. 2. 1. 01.	Bagi Hasil Pajak	224,030,683,842.00
4. 2. 1. 01. 01.	Bagi hasil dari pajak bumi dan bangunan	215,642,315,424.00
4. 2. 1. 01. 02.	Bagi hasil dari pajak penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPH pasal 21	8,388,368,418.00
4. 2. 1. 02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	805,199,687,305.00
4. 2. 1. 02. 05.	Bagi hasil dari iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalti)	5,605,706,600.00
4. 2. 1. 02. 06.	Bagi hasil dari pungutan perusahaan perikanan	241,448,692.00
4. 2. 1. 02. 08.	Bagi hasil dari pertambangan minyak bumi	556,577,078,013.00
4. 2. 1. 02. 09.	Bagi hasil dari pertambangan gas bumi	242,775,454,000.00
4. 2. 2.	Dana Alokasi Umum	85,322,702,000.00
4. 2. 2. 01.	Dana Alokasi Umum	85,322,702,000.00
4. 2. 2. 01. 01.	Dana alokasi umum	85,322,702,000.00
4. 2. 3.	Dana Alokasi Khusus	35,584,610,000.00
4. 2. 3. 01.	Dana Alokasi Khusus	35,584,610,000.00
4. 2. 3. 01. 01.	DAK pendidikan	7,374,760,000.00
4. 2. 3. 01. 02.	DAK kesehatan	4,970,310,000.00
4. 2. 3. 01. 03.	DAK infrastruktur jalan	9,438,430,000.00
4. 2. 3. 01. 05.	DAK infrastruktur air minum	884,240,000.00
4. 2. 3. 01. 06.	DAK infrastruktur sanitasi	815,680,000.00
4. 2. 3. 01. 08.	DAK kelautan dan perikanan	4,043,420,000.00
4. 2. 3. 01. 09.	DAK pertanian	2,875,590,000.00
4. 2. 3. 01. 10.	DAK lingkungan hidup	1,096,190,000.00
4. 2. 3. 01. 11.	DAK keluarga berencana	774,020,000.00
4. 2. 3. 01. 14.	DAK perdagangan	1,285,930,000.00
4. 2. 3. 01. 15.	DAK keselamatan transportasi darat	224,830,000.00
4. 2. 3. 01. 16.	DAK listrik pedesaan	1,801,210,000.00
4. 3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	64,900,771,553.00
4. 3. 3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	29,274,950,872.00
4. 3. 3. 01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	29,274,950,872.00
4. 3. 3. 01. 01.	Bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor	2,984,172,400.00
4. 3. 3. 01. 02.	Bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor	1,782,011,000.00
4. 3. 3. 01. 03.	Bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor	13,303,964,300.00
4. 3. 3. 01. 04.	Bagi hasil dari pajak air permukaan	83,656,100.00
4. 3. 3. 01. 05.	Bagi hasil dari pajak bumi dan bangunan	3,915,742,233.00
4. 3. 3. 01. 06.	Bagi hasil dari biaya pungut PBB	7,205,404,839.00
4. 3. 4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	5,924,490,600.00
4. 3. 4. 01.	Pendapatan Dana Penyesuaian	5,924,490,600.00
4. 3. 4. 01. 02.	Tambahan penghasilan guru PNSD	3,189,750,000.00
4. 3. 4. 01. 03.	Tunjangan profesi guru PNSD	2,734,740,600.00
4. 3. 5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	29,701,330,081.00
4. 3. 5. 01.	Bantuan Keuangan dari Provinsi	29,701,330,081.00
4. 3. 5. 01. 01.	Bantuan keuangan dari Provinsi lain-lain	29,701,330,081.00
	Jumlah	1,236,430,154,700.00
5.	BELANJA	
5. 1.	Belanja Tidak Langsung	556,461,005,060.00
5. 1. 1.	Belanja Pegawai	249,193,289,060.00
5. 1. 1. 01.	Gaji dan Tunjangan	132,731,964,060.00
5. 1. 1. 01. 01.	Gaji pokok PNS/uang representasi 1)	90,453,232,969.00
5. 1. 1. 01. 02.	Tunjangan keluarga	10,362,488,852.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5. 1. 1. 01. 03.	Tunjangan jabatan 1)	7,241,852,250.00
5. 1. 1. 01. 04.	Tunjangan fungsional	5,485,102,363.00
5. 1. 1. 01. 06.	Tunjangan beras 1)	6,433,533,812.00
5. 1. 1. 01. 07.	Tunjangan PPh/tunjangan khusus	2,507,591,434.00
5. 1. 1. 01. 08.	Pembulatan gaji	48,474,413.00
5. 1. 1. 01. 09.	Iuran asuransi kesehatan	1,635,205,272.00
5. 1. 1. 01. 10.	Uang paket 2)	38,682,000.00
5. 1. 1. 01. 11.	Tunjangan panitia musyawarah 2)	25,395,300.00
5. 1. 1. 01. 12.	Tunjangan komisi 2)	30,145,500.00
5. 1. 1. 01. 13.	Tunjangan panitia anggaran 2)	16,625,700.00
5. 1. 1. 01. 14.	Tunjangan badan kehormatan 2)	7,125,300.00
5. 1. 1. 01. 15.	Tunjangan alat kelengkapan lainnya 2)	14,798,700.00
5. 1. 1. 01. 16.	Tunjangan perumahan 2)	3,684,000,000.00
5. 1. 1. 01. 17.	Uang duka wafat/tewas 2)	170,000,000.00
5. 1. 1. 01. 18.	Uang jasa pengabdian 2)	32,235,000.00
5. 1. 1. 01. 19.	Belanja penunjang operasional pimpinan DPRD	312,480,000.00
5. 1. 1. 01. 21.	Tunjangan umum	4,232,995,195.00
5. 1. 1. 02.	Tambahan Penghasilan PNS	114,149,325,000.00
5. 1. 1. 02. 01.	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	3,722,000,000.00
5. 1. 1. 02. 02.	Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas	70,742,325,000.00
5. 1. 1. 02. 03.	Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja	23,695,000,000.00
5. 1. 1. 02. 04.	Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi	12,490,000,000.00
5. 1. 1. 02. 06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	3,500,000,000.00
5. 1. 1. 03.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	1,812,000,000.00
5. 1. 1. 03. 01.	Tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD	1,512,000,000.00
5. 1. 1. 03. 02.	Belanja penunjang operasional KDH/WKDH	300,000,000.00
5. 1. 1. 04.	Biaya Pemungutan Pajak	500,000,000.00
5. 1. 1. 04. 01.	Biaya pemungutan PBB	500,000,000.00
5. 1. 3.	Belanja Subsidi	29,740,916,000.00
5. 1. 3. 01.	Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga	25,850,000,000.00
5. 1. 3. 01. 01.	Belanja subsidi kepada perusahaan	25,850,000,000.00
5. 1. 3. 02.	Belanja Subsidi kepada Masyarakat/Perorangan	3,890,916,000.00
5. 1. 3. 02. 01.	Belanja subsidi kepada rumah tangga miskin (RTM)	3,890,916,000.00
5. 1. 4.	Belanja Hibah	147,455,600,000.00
5. 1. 4. 01.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	2,500,000,000.00
5. 1. 4. 01. 01.	Pemerintah pusat	2,500,000,000.00
5. 1. 4. 05.	Belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi	104,480,000,000.00
5. 1. 4. 05. 01.	Belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi bidang keagamaan	26,965,000,000.00
5. 1. 4. 05. 02.	Belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi bidang kepemudaan dan olah raga	15,840,000,000.00
5. 1. 4. 05. 03.	Belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi bidang kesenian dan kebudayaan	9,605,000,000.00
5. 1. 4. 05. 04.	Belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi bidang kewanitaan	2,980,000,000.00
5. 1. 4. 05. 05.	Belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi bidang profesi	4,000,000,000.00
5. 1. 4. 05. 06.	Belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi bidang non profesi	500,000,000.00
5. 1. 4. 05. 07.	Belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi bidang sosial kemasyarakatan	26,490,000,000.00
5. 1. 4. 05. 08.	Belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi bidang pendidikan dan penelitian	18,100,000,000.00
5. 1. 4. 06.	Belanja Hibah kepada Masyarakat	39,456,000,000.00
5. 1. 4. 06. 01.	Belanja hibah kepada masyarakat	39,456,000,000.00
5. 1. 4. 08.	Belanja Hibah DAK	1,019,600,000.00
5. 1. 4. 08. 01.	Belanja hibah DAK	1,019,600,000.00
5. 1. 5.	Belanja Bantuan Sosial	91,802,400,000.00
5. 1. 5. 02.	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	41,508,000,000.00
5. 1. 5. 02. 03.	Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat untuk pemberdayaan sosial	4,385,000,000.00
5. 1. 5. 02. 05.	Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan	37,123,000,000.00
5. 1. 5. 03.	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	50,294,400,000.00
5. 1. 5. 03. 02.	Belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat untuk perlindungan sosial	224,400,000.00
5. 1. 5. 03. 03.	Belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat untuk pemberdayaan sosial	32,570,000,000.00
5. 1. 5. 03. 04.	Belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat untuk jaminan sosial	17,500,000,000.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5. 1. 7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah De	37,268,800,000.00
5. 1. 7. 03.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	33,758,800,000.00
5. 1. 7. 03. 01.	Belanja bantuan keuangan kepada desa	33,758,800,000.00
5. 1. 7. 04.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah/Pemerintah	3,000,000,000.00
5. 1. 7. 04. 04.	Belanja Bantuan keuangan kepada pemerintah pusat	3,000,000,000.00
5. 1. 7. 05.	Belanja Bantuan kepada Partai Politik	510,000,000.00
5. 1. 7. 05. 01.	Belanja bantuan kepada partai politik	510,000,000.00
5. 1. 8.	Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000.00
5. 1. 8. 01.	Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000.00
5. 1. 8. 01. 01.	Belanja tidak terduga	1,000,000,000.00
5. 2.	Belanja Langsung	939,738,994,940.00
5. 2. 1.	Belanja Pegawai	112,188,167,000.00
5. 2. 1. 01.	Honorarium PNS	29,162,287,500.00
5. 2. 1. 01. 01.	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	8,765,048,000.00
5. 2. 1. 01. 02.	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa	1,786,870,000.00
5. 2. 1. 01. 03.	Honorarium pejabat dan staf pelaksana teknis kegiatan	7,382,165,500.00
5. 2. 1. 01. 04.	Honorarium panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan	1,078,968,500.00
5. 2. 1. 01. 05.	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/fasilitator PNS	3,757,035,000.00
5. 2. 1. 01. 06.	Honorarium petugas/pengawas lapangan/peserta kegiatan	6,392,200,500.00
5. 2. 1. 02.	Honorarium Non PNS	81,285,777,500.00
5. 2. 1. 02. 01.	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	3,737,010,000.00
5. 2. 1. 02. 02.	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	64,294,015,000.00
5. 2. 1. 02. 03.	Honorarium staf administrasi kegiatan	1,656,315,000.00
5. 2. 1. 02. 04.	Honorarium petugas/pengawas lapangan/peserta kegiatan	11,157,837,500.00
5. 2. 1. 02. 05.	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	440,600,000.00
5. 2. 1. 03.	Uang Lembur	378,558,000.00
5. 2. 1. 03. 01.	Uang lembur PNS	79,718,000.00
5. 2. 1. 03. 02.	Uang lembur non PNS	298,840,000.00
5. 2. 1. 05.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1,361,544,000.00
5. 2. 1. 05. 02.	Uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat	1,361,544,000.00
5. 2. 2.	Belanja Barang dan Jasa	404,649,554,580.00
5. 2. 2. 01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13,538,391,150.00
5. 2. 2. 01. 01.	Belanja alat tulis kantor	5,219,726,150.00
5. 2. 2. 01. 02.	Belanja dokumentasi/administrasi tender	320,220,000.00
5. 2. 2. 01. 03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battry kering)	388,350,000.00
5. 2. 2. 01. 04.	Belanja peranko, materai, dan benda pos lainnya	1,454,340,000.00
5. 2. 2. 01. 05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1,176,530,000.00
5. 2. 2. 01. 06.	Belanja bahan bakar minyak/gas	3,796,805,000.00
5. 2. 2. 01. 07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	113,000,000.00
5. 2. 2. 01. 08.	Belanja pengisian tabung gas	3,160,000.00
5. 2. 2. 01. 09.	Belanja spanduk	712,260,000.00
5. 2. 2. 01. 10.	Belanja dekorasi	354,000,000.00
5. 2. 2. 02.	Belanja Bahan/Material	16,169,177,605.00
5. 2. 2. 02. 01.	Belanja bahan baku bangunan	95,000,000.00
5. 2. 2. 02. 02.	Belanja bahan/bibit tanaman	223,650,000.00
5. 2. 2. 02. 03.	Belanja bibit ternak	175,000,000.00
5. 2. 2. 02. 04.	Belanja bahan obat-obatan	6,639,518,405.00
5. 2. 2. 02. 05.	Belanja bahan kimia	702,615,000.00
5. 2. 2. 02. 06.	Belanja bahan alat-alat olahraga	3,000,000.00
5. 2. 2. 02. 07.	Belanja alat perlengkapan	6,981,679,200.00
5. 2. 2. 02. 08.	Belanja material/hadiah	1,348,715,000.00
5. 2. 2. 03.	Belanja Jasa Kantor	38,211,688,247.00
5. 2. 2. 03. 01.	Belanja air	413,512,000.00
5. 2. 2. 03. 02.	Belanja telepon	617,000,000.00
5. 2. 2. 03. 03.	Belanja listrik	4,043,796,000.00
5. 2. 2. 03. 04.	Belanja jasa pengumuman lelang/pemenang lelang	27,500,000.00
5. 2. 2. 03. 05.	Belanja surat kabar/majalah	2,309,260,000.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5. 2. 2. 03. 06.	Belanja kawat/faksimili/internet	2,869,000,000.00
5. 2. 2. 03. 07.	Belanja paket/pengiriman	945,282,000.00
5. 2. 2. 03. 08.	Belanja sertifikasi	133,320,000.00
5. 2. 2. 03. 10.	Belanja jasa administrasi pemungutan pajak penerangan jalan umum	1,400,000,000.00
5. 2. 2. 03. 13.	Belanja jasa medis/laboratorium	13,420,240,247.00
5. 2. 2. 03. 14.	Belanja jasa kebersihan	1,457,699,000.00
5. 2. 2. 03. 15.	Belanja jasa kesenian	364,000,000.00
5. 2. 2. 03. 16.	Belanja jasa administrasi	1,731,000,000.00
5. 2. 2. 03. 17.	Belanja jasa publikasi	3,040,900,000.00
5. 2. 2. 03. 19.	Belanja jasa humas	4,000,000,000.00
5. 2. 2. 03. 20.	Belanja perangkat lunak (software)	445,000,000.00
5. 2. 2. 03. 21.	Belanja jasa keamanan	994,179,000.00
5. 2. 2. 04.	Belanja Premi Asuransi	699,800,000.00
5. 2. 2. 04. 01.	Belanja premi asuransi kesehatan 2)	695,000,000.00
5. 2. 2. 04. 02.	Belanja premi asuransi barang milik daerah	4,800,000.00
5. 2. 2. 05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14,051,933,040.00
5. 2. 2. 05. 01.	Belanja jasa service	7,486,533,040.00
5. 2. 2. 05. 02.	Belanja penggantian suku cadang	2,663,500,000.00
5. 2. 2. 05. 03.	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas	3,901,900,000.00
5. 2. 2. 06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13,171,049,750.00
5. 2. 2. 06. 01.	Belanja cetak	7,220,605,500.00
5. 2. 2. 06. 02.	Belanja penggandaan	5,452,685,250.00
5. 2. 2. 06. 03.	Belanja dokumentasi	497,759,000.00
5. 2. 2. 07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6,414,763,000.00
5. 2. 2. 07. 01.	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	839,000,000.00
5. 2. 2. 07. 02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	4,572,413,000.00
5. 2. 2. 07. 03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1,003,350,000.00
5. 2. 2. 08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6,528,626,550.00
5. 2. 2. 08. 01.	Belanja sewa sarana mobilitas darat	4,389,235,000.00
5. 2. 2. 08. 02.	Belanja sewa sarana mobilitas air	2,139,391,550.00
5. 2. 2. 10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	632,100,000.00
5. 2. 2. 10. 01.	Belanja sewa meja kursi	24,500,000.00
5. 2. 2. 10. 02.	Belanja sewa komputer dan printer	4,000,000.00
5. 2. 2. 10. 03.	Belanja sewa proyektor	6,500,000.00
5. 2. 2. 10. 04.	Belanja sewa generator	10,000,000.00
5. 2. 2. 10. 05.	Belanja sewa tenda	166,000,000.00
5. 2. 2. 10. 07.	Belanja sewa peralatan sound sistem	291,600,000.00
5. 2. 2. 10. 08.	Belanja sewa peralatan survey	127,500,000.00
5. 2. 2. 10. 09.	Belanja sewa perlengkapan media peliputan acara	2,000,000.00
5. 2. 2. 11.	Belanja Makanan dan Minuman	33,869,166,400.00
5. 2. 2. 11. 01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4,491,620,000.00
5. 2. 2. 11. 02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3,456,722,200.00
5. 2. 2. 11. 03.	Belanja makanan dan minuman tamu	2,308,820,000.00
5. 2. 2. 11. 04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	21,231,804,200.00
5. 2. 2. 11. 05.	Belanja makanan dan minuman pelajar/siswa	1,890,000,000.00
5. 2. 2. 11. 06.	Belanja makanan dan minuman pasien	490,200,000.00
5. 2. 2. 12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	422,965,800.00
5. 2. 2. 12. 01.	Belanja pakaian dinas KDH dan WKDH	6,864,000.00
5. 2. 2. 12. 03.	Belanja pakaian sipil lengkap (PSL)	23,524,800.00
5. 2. 2. 12. 04.	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	37,950,000.00
5. 2. 2. 12. 05.	Belanja pakaian dinas upacara (PDU)	160,000,000.00
5. 2. 2. 12. 06.	Belanja pakaian sipil resmi (PSR)	84,490,000.00
5. 2. 2. 12. 06.	Belanja pakaian sipil resmi (PSR)	55,301,000.00
5. 2. 2. 12. 07.	Belanja pakaian dinas lengkap (PDL)	14,196,000.00
5. 2. 2. 12. 08.	Belanja atribut	40,640,000.00
5. 2. 2. 13.	Belanja Pakaian Kerja	1,021,865,000.00
5. 2. 2. 13. 01.	Belanja pakaian kerja lapangan	1,021,865,000.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5. 2. 2. 14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	1,113,368,700.00
5. 2. 2. 14. 01.	Belanja pakaian KORPRI	886,200.00
5. 2. 2. 14. 02.	Belanja pakaian adat daerah	83,096,500.00
5. 2. 2. 14. 04.	Belanja pakaian olahraga	599,386,000.00
5. 2. 2. 14. 06.	Belanja pakaian seragam	430,000,000.00
5. 2. 2. 15.	Belanja Perjalanan Dinas	149,148,859,730.00
5. 2. 2. 15. 01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	44,841,192,730.00
5. 2. 2. 15. 02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	84,977,397,000.00
5. 2. 2. 15. 03.	Belanja perjalanan dinas luar negeri	174,000,000.00
5. 2. 2. 15. 04.	Belanja transportasi dan akomodasi	19,156,270,000.00
5. 2. 2. 16.	Belanja Bea Siswa Pendidikan PNS	3,375,000,000.00
5. 2. 2. 16. 01.	Belanja beasiswa tugas belajar D3	1,200,000,000.00
5. 2. 2. 16. 02.	Belanja beasiswa tugas belajar S1	1,215,000,000.00
5. 2. 2. 16. 03.	Belanja beasiswa tugas belajar S2	600,000,000.00
5. 2. 2. 16. 04.	Belanja beasiswa tugas belajar S3	60,000,000.00
5. 2. 2. 16. 05.	Belanja beasiswa tugas belajar spesialis	300,000,000.00
5. 2. 2. 17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	6,106,904,000.00
5. 2. 2. 17. 01.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	5,632,904,000.00
5. 2. 2. 17. 02.	Belanja sosialisasi	10,000,000.00
5. 2. 2. 17. 04.	Belanja kontribusi bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, dan lokakarya	319,000,000.00
5. 2. 2. 17. 05.	Belanja penelitian dan studi	145,000,000.00
5. 2. 2. 18.	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	100,000,000.00
5. 2. 2. 18. 01.	Belanja perjalanan pindah tugas dalam daerah	100,000,000.00
5. 2. 2. 20.	Belanja Pemeliharaan	31,380,044,000.00
5. 2. 2. 20. 01.	Belanja pemeliharaan jalan	4,296,000,000.00
5. 2. 2. 20. 02.	Belanja pemeliharaan jembatan	1,700,000,000.00
5. 2. 2. 20. 03.	Belanja pemeliharaan bangunan	13,559,900,000.00
5. 2. 2. 20. 04.	Belanja pemeliharaan jaringan	342,400,000.00
5. 2. 2. 20. 05.	Belanja pemeliharaan peralatan	9,609,744,000.00
5. 2. 2. 20. 07.	Belanja pemeliharaan sistem komputerisasi (software)	1,397,000,000.00
5. 2. 2. 20. 09.	Belanja pemeliharaan perlengkapan	475,000,000.00
5. 2. 2. 21.	Belanja Jasa Konsultasi	52,454,386,608.00
5. 2. 2. 21. 01.	Belanja jasa konsultasi penelitian	4,175,000,000.00
5. 2. 2. 21. 02.	Belanja jasa konsultasi perencanaan	32,552,640,588.00
5. 2. 2. 21. 03.	Belanja jasa konsultasi pengawasan	14,186,746,020.00
5. 2. 2. 21. 04.	Belanja jasa konsultasi manajemen	1,145,000,000.00
5. 2. 2. 21. 05.	Belanja jasa konsultasi IT	395,000,000.00
5. 2. 2. 23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8,943,525,000.00
5. 2. 2. 23. 01.	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	8,943,525,000.00
5. 2. 2. 25.	Belanja Barang Dana BROS	7,295,940,000.00
5. 2. 2. 25. 01.	Belanja barang BROS	7,295,940,000.00
5. 2. 3.	Belanja Modal	422,901,273,360.00
5. 2. 3. 01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	16,754,850,000.00
5. 2. 3. 01. 06.	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan sekolah dasar	162,500,000.00
5. 2. 3. 01. 07.	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan menengah umum dan kejuruan	80,000,000.00
5. 2. 3. 01. 31.	Belanja modal pengadaan tanah fasilitas umum dan sosial	16,512,350,000.00
5. 2. 3. 02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	350,000,000.00
5. 2. 3. 02. 11.	Belanja modal mesin pemecah batu (stone crusher)	350,000,000.00
5. 2. 3. 03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	6,754,670,850.00
5. 2. 3. 03. 04.	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor bus	1,600,000,000.00
5. 2. 3. 03. 05.	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus	1,000,000,000.00
5. 2. 3. 03. 06.	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck	412,500,000.00
5. 2. 3. 03. 07.	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangki (air, minyak dan tinja)	95,000,000.00
5. 2. 3. 03. 09.	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up	3,112,650,850.00
5. 2. 3. 03. 11.	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran	66,520,000.00
5. 2. 3. 03. 12.	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	468,000,000.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5. 2. 3. 04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	226,800,000.00
5. 2. 3. 04. 05.	Belanja modal pengadaan karavan	226,800,000.00
5. 2. 3. 05.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Bermotor	830,000,000.00
5. 2. 3. 05. 01.	Belanja modal pengadaan kapal motor	830,000,000.00
5. 2. 3. 06.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor	135,000,000.00
5. 2. 3. 06. 02.	Belanja modal pengadaan perahu sampan	135,000,000.00
5. 2. 3. 08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	620,900,000.00
5. 2. 3. 08. 01.	Belanja modal pengadaan mesin las	64,500,000.00
5. 2. 3. 08. 05.	Belanja modal pengadaan mesin generator	503,000,000.00
5. 2. 3. 08. 06.	Belanja modal pengadaan peralatan bengkel	53,400,000.00
5. 2. 3. 09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	281,500,000.00
5. 2. 3. 09. 01.	Belanja modal pengadaan penggiling hasil pertanian	171,000,000.00
5. 2. 3. 09. 03.	Belanja modal pengadaan mesin bajak	98,000,000.00
5. 2. 3. 09. 05.	Belanja modal pengadaan mesin potong	7,500,000.00
5. 2. 3. 09. 06.	Belanja modal pengadaan pompa air	5,000,000.00
5. 2. 3. 10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	794,049,830.00
5. 2. 3. 10. 01.	Belanja modal pengadaan mesin tik	5,050,000.00
5. 2. 3. 10. 02.	Belanja modal pengadaan mesin hitung	29,600,000.00
5. 2. 3. 10. 05.	Belanja modal pengadaan mesin cetak	85,000,000.00
5. 2. 3. 10. 08.	Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas	67,490,000.00
5. 2. 3. 10. 10.	Belanja modal pengadaan papan visual elektronik	24,000,000.00
5. 2. 3. 10. 11.	Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran	77,500,000.00
5. 2. 3. 10. 12.	Belanja modal pengadaan alat pendingin ruangan	409,664,830.00
5. 2. 3. 10. 17.	Belanja modal pengadaan papan plang kantor	24,495,000.00
5. 2. 3. 10. 18.	Belanja modal pengadaan teropong	8,250,000.00
5. 2. 3. 10. 20.	Belanja modal pengadaan kipas angin	29,500,000.00
5. 2. 3. 10. 21.	Belanja modal pengadaan TV	33,500,000.00
5. 2. 3. 11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1,234,715,000.00
5. 2. 3. 11. 02.	Belanja modal pengadaan almari	557,970,000.00
5. 2. 3. 11. 03.	Belanja modal pengadaan brankas	62,470,000.00
5. 2. 3. 11. 04.	Belanja modal pengadaan filling kabinet	275,057,000.00
5. 2. 3. 11. 05.	Belanja modal pengadaan white board	21,218,000.00
5. 2. 3. 11. 07.	Belanja modal pengadaan hiasan ruang kantor	133,000,000.00
5. 2. 3. 11. 08.	Belanja modal pengadaan papan pengumuman	3,000,000.00
5. 2. 3. 11. 09.	Belanja modal pengadaan gerobak	3,000,000.00
5. 2. 3. 11. 10.	Belanja modal pengadaan tenda	160,000,000.00
5. 2. 3. 11. 11.	Belanja modal pengadaan papan struktur	19,000,000.00
5. 2. 3. 12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4,252,574,800.00
5. 2. 3. 12. 01.	Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server	290,000,000.00
5. 2. 3. 12. 02.	Belanja modal pengadaan komputer/PC	1,774,754,000.00
5. 2. 3. 12. 03.	Belanja modal pengadaan komputer note book	1,042,748,000.00
5. 2. 3. 12. 04.	Belanja modal pengadaan printer	284,584,000.00
5. 2. 3. 12. 05.	Belanja modal pengadaan scanner	115,500,000.00
5. 2. 3. 12. 06.	Belanja modal pengadaan monitor/display	12,500,000.00
5. 2. 3. 12. 08.	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	304,900,000.00
5. 2. 3. 12. 09.	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flasdisk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	15,588,800.00
5. 2. 3. 12. 10.	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	100,000,000.00
5. 2. 3. 12. 11.	Belanja modal pengadaan software/aplikasi komputer	312,000,000.00
5. 2. 3. 13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	5,076,187,050.00
5. 2. 3. 13. 01.	Belanja modal pengadaan meja kerja	876,529,450.00
5. 2. 3. 13. 02.	Belanja modal pengadaan meja rapat	17,000,000.00
5. 2. 3. 13. 04.	Belanja modal pengadaan kursi kerja	870,457,000.00
5. 2. 3. 13. 05.	Belanja modal pengadaan kursi rapat	207,920,000.00
5. 2. 3. 13. 07.	Belanja modal pengadaan tempat tidur	38,220,600.00
5. 2. 3. 13. 08.	Belanja modal pengadaan sofa	14,000,000.00
5. 2. 3. 13. 09.	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	16,500,000.00
5. 2. 3. 13. 10.	Belanja modal pengadaan kursi sekolah	1,213,800,000.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5. 2. 3. 13. 11.	Belanja modal pengadaan meja sekolah	1,821,760,000.00
5. 2. 3. 14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	23,395,760.00
5. 2. 3. 14. 04.	Belanja modal pengadaan dispenser	18,395,760.00
5. 2. 3. 14. 06.	Belanja modal pengadaan rak piring	5,000,000.00
5. 2. 3. 15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	446,400,000.00
5. 2. 3. 15. 01.	Belanja modal pengadaan lampu hias	119,000,000.00
5. 2. 3. 15. 04.	Belanja modal pengadaan gordena/tirai	327,400,000.00
5. 2. 3. 16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	1,395,596,000.00
5. 2. 3. 16. 01.	Belanja modal pengadaan kamera	316,944,000.00
5. 2. 3. 16. 02.	Belanja modal pengadaan handycam	184,552,000.00
5. 2. 3. 16. 03.	Belanja modal pengadaan proyektor	126,000,000.00
5. 2. 3. 16. 05.	Belanja modal pengadaan sound system	637,100,000.00
5. 2. 3. 16. 06.	Belanja modal pengadaan alat perekam	131,000,000.00
5. 2. 3. 17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	342,350,000.00
5. 2. 3. 17. 01.	Belanja modal pengadaan telepon	4,800,000.00
5. 2. 3. 17. 02.	Belanja modal pengadaan faximili	3,000,000.00
5. 2. 3. 17. 03.	Belanja modal pengadaan radio SSB	65,000,000.00
5. 2. 3. 17. 04.	Belanja modal pengadaan radio HF/FM (handy talkie)	189,550,000.00
5. 2. 3. 17. 08.	Belanja modal pengadaan peralatan internet wireless	80,000,000.00
5. 2. 3. 18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	174,800,000.00
5. 2. 3. 18. 04.	Belanja modal pengadaan alat GPS	174,800,000.00
5. 2. 3. 19.	Belanja Modal pengadaan Alat-alat Kedokteran	10,210,708,000.00
5. 2. 3. 19. 01.	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum	5,951,294,000.00
5. 2. 3. 19. 04.	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran mata	1,700,000,000.00
5. 2. 3. 19. 07.	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan	2,559,414,000.00
5. 2. 3. 21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	136,910,900,950.00
5. 2. 3. 21. 04.	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan lapis hotmix	48,453,273,000.00
5. 2. 3. 21. 05.	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan lapis penetrasi macadam	12,954,156,500.00
5. 2. 3. 21. 06.	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan beton bertulang	26,522,000,000.00
5. 2. 3. 21. 07.	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan semen	15,818,340,000.00
5. 2. 3. 21. 08.	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan tanah	33,163,131,450.00
5. 2. 3. 22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	9,721,582,000.00
5. 2. 3. 22. 04.	Belanja modal pengadaan konstruksi penyebrangan diatas air	9,721,582,000.00
5. 2. 3. 23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	21,898,590,400.00
5. 2. 3. 23. 01.	Belanja modal pengadaan konstruksi bendungan	376,364,000.00
5. 2. 3. 23. 05.	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi	4,874,331,000.00
5. 2. 3. 23. 06.	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	6,776,673,800.00
5. 2. 3. 23. 10.	Belanja modal pengadaan konstruksi drainase	9,850,221,600.00
5. 2. 3. 23. 13.	Belanja modal pengadaan instalasi konstruksi jaringan air	21,000,000.00
5. 2. 3. 25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	10,000,450,000.00
5. 2. 3. 25. 01.	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	2,283,000,000.00
5. 2. 3. 25. 02.	Belanja modal pengadaan instalasi telepon	10,000,000.00
5. 2. 3. 25. 03.	Belanja modal pengadaan pembangkit listrik	7,707,450,000.00
5. 2. 3. 26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	184,361,816,720.00
5. 2. 3. 26. 01.	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	46,828,891,400.00
5. 2. 3. 26. 03.	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas	6,127,385,500.00
5. 2. 3. 26. 04.	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang	724,687,000.00
5. 2. 3. 26. 06.	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan monumen	90,000,000.00
5. 2. 3. 26. 08.	Belanja modal pengadaan konstruksi pelabuhan/tambatan perahu	14,216,000,000.00
5. 2. 3. 26. 09.	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung/tempat	37,137,127,620.00
5. 2. 3. 26. 10.	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bandar udara	40,000,000,000.00
5. 2. 3. 26. 11.	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian tugu batas/patok batas	70,000,000.00
5. 2. 3. 26. 12.	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan lainnya	39,167,725,200.00
5. 2. 3. 27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	8,758,436,000.00
5. 2. 3. 27. 13.	Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	8,383,436,000.00
5. 2. 3. 27. 16.	Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi	175,000,000.00
5. 2. 3. 27. 19.	Belanja modal pengadaan buku ekonomi dan keuangan	170,000,000.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5. 2. 3. 27. 21.	Belanja modal pengadaan buku peraturan perundang-undangan	25,000,000.00
5. 2. 3. 27. 25.	Belanja modal pengadaan peta/atlas/globe	5,000,000.00
5. 2. 3. 29.	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	200,000,000.00
5. 2. 3. 29. 03.	Belanja modal pengadaan tanaman	200,000,000.00
5. 2. 3. 30.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	55,000,000.00
5. 2. 3. 30. 07.	Belanja modal pengadaan detektor logam	15,000,000.00
5. 2. 3. 30. 09.	Belanja modal pengadaan pentungan	40,000,000.00
5. 2. 3. 32.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Lainnya	1,090,000,000.00
5. 2. 3. 32. 03.	Belanja modal pengadaan marka/rambu-rambu	1,077,500,000.00
5. 2. 3. 32. 06.	Belanja modal pengadaan kasur	12,500,000.00
	Jumlah	1,496,200,000,000.00
	Surplus / (Defisit)	(259,769,845,300.00)
6.	PEMBIAYAAN	
6. 1.	Penerimaan Pembiayaan	259,769,845,300.00
6. 1. 1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	259,769,845,300.00
6. 1. 1. 02.	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	35,194,584,880.00
6. 1. 1. 02. 02.	Bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam	35,194,584,880.00
6. 1. 1. 04.	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	224,575,260,420.00
6. 1. 1. 04. 01.	Belanja pegawai dari belanja tidak langsung	30,960,212,980.00
6. 1. 1. 04. 02.	Belanja pegawai dari belanja langsung	193,615,047,440.00
	Jumlah	259,769,845,300.00
	Pembiayaan neto	259,769,845,300.00
	Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA/SIKPA)	0

Ranai, 16 Februari 2012

BUPATI NATUNA

ttd

Drs. Ilyas Sabli